BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja merupakan hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Kinerja yang baik akan membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, dengan meningkatnya kinerja perusahaan maka akan semakin baik pula nilai perusahaan bagi investor. Untuk menilai kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan (Al'akbar, 2016).

Laporan keuangan merupakan alat untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemegang saham. Selain itu laporan keuangan juga dibuat untuk memudahkan pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari perusahaan. Sesuai dengan tujuan laporan keuangan dalam kerangka konseptual *Financial Accounting Standars Board* (FSAB) adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis.

Kinerja keuangan sangat berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, karena kinerja keuangan dapat menggambarkan tentang baik buruknya kondisi keuangan di suatu perusahaan. Bagi pihak internal (manajemen perusahaan) kinerja keuangan digunakan sebagai alat untuk menentukan tolak ukur atau pencapaian perusahaan tersebut. Sedangkan bagi pihak eksternal (investor) kinerja keuangan digunakan untuk menentukan peluang investasi potensial dan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut

UNMAS DENPASAR

layak bagi pihak eksternal (investor). Salah satu pendekatan yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan adalah menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Menurut Prasinta (2012) bahwa salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan informasi mengenai kebijakan dan keputusan para investor dalam menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan lebih dipengaruhi oleh rasio profitabilitas. Salah satu rasio proitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yaitu ROE.

Return On Equity (ROE) dapat dilihat dari laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan. Dengan mengetahui rasio ROE maka investor dapat mengetahui atau memprediksi berapa besar keuntungan yang didapat investor jika melaukan investasi di dalam perusahaan tersebut. *Return on equity* (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan kedepannya. Persentase ROE yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik, sehingga mengakibatkan investor tertarik menanamkan modalnya. Sebaliknya, jika persentase ROE yang rendah menunjukkan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang tidak baik, sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan yang bersangkutan (Wati, 2012).

Penyebaran virus Covid-19 pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 31 Desember 2019. Virus Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan

UNMAS DENPASAR

seperti flu hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Penyebaran virus ini sangat cepat dan sudah banyak negara yang mengkonfirmasi warganya terinfeksi virus Covid-19 termasuk Indonesia. Organisasi kesehatan dunia atau WHO mengumumkan virus Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 yang diumumkan oleh Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada kegiatan perekonomian dunia yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, salah satu sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19 yaitu perusahaan sektor pertambangan. Kinerja keuangan perusahaan sektor pertambangan yang diukur menggunakan ROE mengalami penurunan pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 ROE perusahaan sektor pertambangan meningkat drastis. ROE perusahaan sektor pertambangan pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, dimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

UNMAS DENPASAR

Gambar 1. 1
Rata-rata ROE Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021

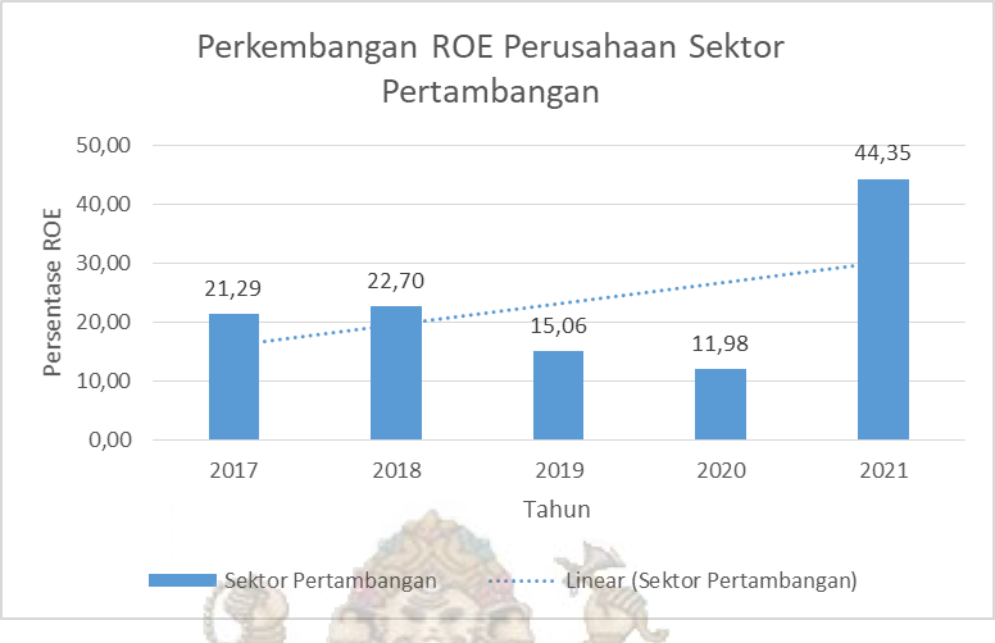

Sumber: https://www.idx.co.id, 2022 (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa ROE perusahaan sektor pertambangan mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. ROE perusahaan sektor pertambangan yang paling rendah yaitu pada tahun 2020 dan ROE perusahaan sektor pertambangan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2021. Rincian perkembangan ROE perusahaan sektor pertambangan adalah sebagai berikut: pada tahun 2017-2018 ROE perusahaan sektor pertambangan mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 6,62%, kemudian pada tahun 2018-2019 ROE perusahaan sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 33,66%, selanjutnya pada tahun 2019-2020 ROE perusahaan sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 20,45%, dan pada tahun 2020-2021 ROE perusahaan sektor pertambangan mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 270,20% bisa dikatakan pada tahun 2021 ROE perusahaan sektor pertambangan meningkat hampir 3 kali lipat dari tahun

UNMAS DENPASAR

2020. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan yang diproksikan oleh ROE perusahaan sektor pertambangan mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Dari fenomena tersebut, perusahaan sektor pertambangan menarik untuk diteliti karena kinerja keuangannya mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2021 dimana pada tahun tersebut masih terjadi pandemi Covid-19.

Peningkatan kinerja keuangan sangat penting bagi perusahaaan untuk menarik minat investor. Karena semakin baik kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun akan membuat investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di dalam perusahaaan. Kinerja keuangan yang baik juga menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dapat mengelola dana perusahaan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan salah satunya adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Berikut data perkembangan *Good Corporate Governance* pada perusahaan sektor pertambangan yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit pada perusahaan sektor pertambangan dari tahun 2017 samapai tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

UNMAS DENPASAR

Tabel 1. 1
Rata-rata GCG Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021

TAHUN	GCG			
	Kepemilikan Manajerial (%)	Kepemilikan Institusional (%)	Komisaris Independen (%)	Komite Audit
2017	8,59	56,65	41,37	3
2018	8,14	57,52	41,01	3
2019	8,07	57,37	43,53	3
2020	7,74	57,11	43,41	3
2021	7,10	56,77	42,43	3

Sumber: https://www.idx.co.id, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa perkembangan GCG perusahaan sektor pertambangan yang diproksikan oleh kepemilikan manajerial mengalami penurunan, kepemilikan institusional mengalami peningkatan, komisaris independen juga mengalami peningkatan dan komite audit cenderung tetap dari tahun 2017-2021. Rincian perkembangan GCG perusahaan sektor pertambangan adalah sebagai berikut: pada tahun 2017 persentase kepemilikan manajerial sebesar 8,59% dari total saham yang beredar, persentase kepemilikan institusional sebesar 56,65% dari total saham yang beredar, persentase komisaris independen sebesar 41,37% dari jumlah komisaris perusahaan dan jumlah komite audit sebanyak 3 orang. Pada tahun 2018 persentase kepemilikan manajerial menurun 0,45% menjadi 8,14%, persentase kepemilikan institusional meningkat 0,87% menjadi 57,52%, persentase komisaris independen menurun 0,36% menjadi 41,01% dan jumlah komite audit tetap 3 orang. Pada tahun 2019 persentase kepemilikan manajerial menurun 0,07% menjadi 8,07%, persentase kepemilikan institusional juga menurun 0,15% menjadi 57,37%, persentase komisaris independen meningkat 2,52% menjadi 43,53% dan jumlah komite audit tetap

UNMAS DENPASAR

3 orang. Pada tahun 2020 persentase kepemilikan manajerial menurun 0,33% menjadi 7,74%, persentase kepemilikan institusional juga menurun 0,26% menjadi 57,11%, persentase komisaris independen juga menurun 0,12% menjadi 43,41% dan jumlah komite audit tetap 3 orang. Pada tahun 2020 persentase kepemilikan manajerial menurun 0,64% menjadi 7,10%, persentase kepemilikan institusional juga menurun 0,33% menjadi 56,77%, persentase komisaris independen juga menurun 0,98% menjadi 42,43% dan jumlah komite audit tetap 3 orang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan GCG perusahaan sektor pertambangan yang meliputi kepemilikan manajerial mengalami penurunan pada tahun 2017-2018, kepemilikan institusional dan komisaris independen mengalami peningkatan pada tahun 2017-2018, sedangkan komite audit cenderung tetap dari tahun 2017-2021. Dari fenomena tersebut, perusahaan sektor pertambangan menarik untuk diteliti karena perkembangan GCGnya tidak terlalu meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan akan meningkatkan keberhasilan manajemen untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis internasional (Suryanto dan

UNMAS DENPASAR

Refianto, 2019). Karena dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* akan membantu pihak manajemen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Selain itu *Good Corporate Governance* merupakan salah satu indikator yang diperhatikan pihak investor sebelum melakukan investasi. Menurut Nababan, dkk (2021) para investor percaya bahwa perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* selalu berupaya untuk meminimalkan risiko bisnis yang dihadapi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abduh dan Rusliati (2018) menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, berarti bahwa semakin baik *Corporate Governance* yang diterapkan oleh suatu perusahaan maka semakin baik juga kinerja keuangan dari suatu perusahaan tersebut, karena dengan penerapan *Good Corporate Governance* akan memastikan pihak manajemen perusahaan melakukan kewajibannya kepada pihak yang berkepentingan *(stakeholder*) dengan tujuan mendatangkan maupun menjaga pemegang saham melalui kinerja keuangan (Ardiani dan Dian, 2015). Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Suryanto dan Refianto (2019) serta didukung oleh penelitian Nababan, dkk (2021).

Good Corporate Governance mulai sering terdengar di Indonesia pada tahun 2000-an ketika Indonesia baru pulih dari krisis moneter tahun 1997-1998. Seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di

UNMAS DENPASAR

akhir tahun 90-an adalah tata kelola perusahaan yang kurang baik, antara lain berupa kualitas investasi yang buruk, diversifikasi usaha yang sangat luas, jumlah pinjaman jangka pendek tak lindung nilai yang sangat banyak, lemahnya peran direksi dan komisaris, sistem audit yang buruk, kurangnya transparansi, serta penegakan hukum yang lemah. Maka dari itu penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting dilakukan oleh perusahaan. Jika pelaksanaannya dilakukan dengan baik, maka sistem *Good Corporate Governance* akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditur, sehingga menanamkan kepercayaan pihak-pihak tersebut atas investasinya terhadap perusahaan. Menurut Suryanto dan Refianto (2019*) Good Corporate Governance* meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan (*principal*) dan pengelolaan perusahaan (*agent*) dapat menciptakan masalah keagenan. Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimalisir dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya keagenan (*agency cost*). Salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.

Kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana pihak manajemen perusahaan memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain pihak manajemen tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dengan

UNMAS DENPASAR

adanya kepemilikan manajerial dapat menekan masalah keagenan, dan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri dengan mengurangi resiko keuangan perusahaan. Anggraini (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang semakin besar dalam perusahaan maka akan semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dalam suatu perusahaan institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, swasta, domestik maupun asing. Kepemilikan saham institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham institusi mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen dalam meningkatkan kinerja keuangan (Suryanto dan Refianto, 2019). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mengarah kepada upaya pengawasan yang lebih besar oleh investor institusi terhadap perilaku manajer. menurut Novitasari, dkk (2020) peningkatan kepemilikan saham institusional dalam struktur pemegang saham akan mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer sehingga manajemen akan lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan.

komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan

UNMAS DENPASAR

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan mampu memberikan keseimbangan berbagai kepentingan pihak serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. Menurut Asward (2015) semakin banyak jumlah anggota komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin baik tingkat pengawasan terhadap manajemen, sehingga manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* melalui peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Komite audit merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan. Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai (Wiariningsih dkk, 2019). Komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya sebab penggunaan komite audit merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan semkakin besar juga fungsi pengawasan komite audit terhadap kinerja manajemen.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan sudah banyak dilakukan

UNMAS DENPASAR

seperti penelitian-penelitian berikut ini: penelitian Abduh dan Rusliati (2018) tentang ”Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Aprila, dkk (2022) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa dewan komisaris, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Muntahanah dan Murdijaningsih (2020) tentang “Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pertambangan di Indonesia”. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang dilihat dari kepemilikan manajerial dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pertambangan. Sedangkan tata kelola perusahaan yang dilihat dari komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pertambangan.

Penelitian Nababan, dkk (2021) tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan

UNMAS DENPASAR

institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROE. Sedangkan komisaris independen berpengaruh terhadap ROE.

Novitasari, dkk (2020) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan variabel dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Suryanto dan Refianto (2019) tentang "Analisis Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen menghasilkan pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Wiariningsih, dkk (2019) dengan penelitiannya yang berjudul "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016". Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas penulis menemukan adanya *research gap* atau perbedaan hasil penelitian.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu tersebut pengaruh dari masing-masing indikator *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan masih beragam, sehingga penulis tertarik untuk meneliti kembali pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Penulis memfokuskan pada penerapan *Good Corporate Governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit di perusahaan sektor pertambangan.

Penulis meneliti perusahaan sektor pertambangan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah bahan tambang. Tidak dapat dipungkiri lagi, industri pertambangan di Indonesia tetap menjadi primadona utama bagi para investor untuk berinvestasi di dalamnya. Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, memenuhi kebutuhan energi, menghasilkan devisa bagi pembangunan, menyediakan lapangan kerja dan menciptakan kesempatan – kesempatan berusaha bagi lingkungan sekitarnya. Itulah mengapa pertambangan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Karena alasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti perusahaan sektor pertambangan.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan sektor pertambangan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit. Selain itu Penulis juga tertarik untuk menguji pengaruhnya terhadap

kinerja keuangan yang diuukur dengan *Return on Equity* (ROE). Maka dari itu penulis mengambil judul "**Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021".**

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan di BEI?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan di BEI?
3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan di BEI?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan di BEI?

UNMAS DENPASAR

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan di BEI:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan di BEI.

2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan di BEI.
3. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan di BEI.
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan di BEI.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Good Corporate Gouvernanc*e terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis
   a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan perusahaan.
   b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh *Good*

UNMAS DENPASAR

*Corporate Governanc*e terhadap kinerja keuangan perusahaan, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.

d. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen agar dapat mengimplementasikan *Good Corporate Governance* untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

e. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi kepada investor mengenai kinerja keuangan perusahaan dengan melihat penerapan *Good Corporate Governance*, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan investasi secara tepat dan menguntungkan di masa yang akan datang.

UNMAS DENPASAR

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

A. Teori agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian deviden, sedangkan agen memperoleh gaji, bonus dan berbagai macam kompensasi lainnya. Teori keagenan (*agency theory*) juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda, dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola suatu perusahaan. Tujuan utama teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian.

Menurut Eisenhardt menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan

UNMAS DENPASAR

(3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Teori keagenan adalah teori yang paling tepat untuk membahas masalah tentang *Good Corporate Governance*, karena teori keagenan memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa setiap organisasi individu (*agent*) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya (*principal*), hubungan antara keduannya disebut *the principal-agent relationship*. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Manajemen merupakan yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Pemisahan kepentingan tersebut tentu akan menimbulkan konflik. Karena manajer lebih mengetahui pengelolaan di dalam perusahaan, sehingga fokusnya adalah untuk menghasilkan laba yang tinggi. Sedangkan keinginan pemegang saham adalah untuk mensejahterakan pemegang saham itu sendiri melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan. Konflik keagenan tersebut timbul akibat perbedaan kepentingan dan sulitnya menyatukan keinginan antara pemilik perusahaan dan pengelola, sehingga tindakan agent tidak selalu sesuai dengan keinginan principal. Dengan kondisi tersebut mendorong principal untuk mengawasi agent. Oleh karena itu perusahaan perlu

UNMAS DENPASAR

menerapkan *Good Corporate Governance* untuk mengatasi masalah tersebut.

B. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance adalah sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders, dan menciptakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal, dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atau suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut Muh. Arief Effendi (2016:11) *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap stakeholders. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. Menurut Bambang Rianto Rustam (2017:294) *Corporate*

UNMAS DENPASAR

Governance merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. Corporate Governance menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders atau para pemangku kepentingan.

1. Prinsip *Good Corporate Governance*

   Menurut Hamdani (2016:72) terdapat 5 (lima) prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* yaitu sebagai berikut:

   a. Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.
   b. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang

UNMAS DENPASAR

profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan.

c. Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.

d. Prinsip dari independensi (*independency*) dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independensi sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

e. Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan tindakan kecurangan.

2. Tujuan penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan yaitu sebagai berikut:

a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik.

b. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah.

c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

UNMAS DENPASAR

d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

3. Manfaat penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan menerapkan konsep good corporate governance sebagai berikut:

a. Menjaga sustainbility (ketersinambungan) perusahaan.
b. Meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar.
c. Mengurangi agency cost, dan cost of capital.
d. Meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan terhadap stakeholders.
e. Melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum.
f. Membantu terwujudnya good corporate citizen.

4. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme good corporate governance merupakan suatu prosedur yang dapat memberikan nilai tambah (*value added*) dan keuntungan bagi para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,dewan komisaris independen, dan komite audit.

UNMAS DENPASAR

a. Kepemilikan Manajerial

Menurut Robertus dan Bambang Gunawan (2016:75) kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut sebagai pengelola sekaligus pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme corporate governance yang dapat digunakan untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilkan saham oleh manajemen (Pratiwi, 2016). Kepemilikan manajerial diukur dengan formula sebagai berikut :

$$KM = \frac{JUMLAH\ SAHAM\ YANG\ DIMILIKI\ MANAJEMEN}{JUMLAH\ SAHAM\ YANG\ BEREDAR}\ x\ 100\% \quad .....(1)$$

b. Kepemilikan Institusional

Menurut Robertus dan Bambang Gunawan (2016:78) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukannya. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan dan dana pensiun. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya

UNMAS DENPASAR

akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau stakeholders (Pratiwi, 2016). kepemilikan institusional diukur dengan formula sebagai berikut :

$$KI = \frac{JUMLAH\ SAHAM\ YANG\ DIMILIKI\ INSTITUSI}{JUMLAH\ SAHAM\ YANG\ BEREDAR}\ x\ 100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

c. Dewan Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik yang menyebutkan bahwa jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris independen diukur dengan formula sebagai berikut:

$$DKI = \frac{JUMLAH\ DEWAN\ KOMISARIS\ INDEPENDEN}{JUMLAH\ DEWAN\ KOMISARIS}\ x\ 100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (3)$$

d. Komite Audit

Komite audit adalah anggota yang disusun oleh dewan komisaris yang tugasnya meringankan dewan komisaris dalam

melaksanakan tugas fungsinya dalam mengawasi atas kegiatan perseroan. Komite audit sebaiknya memastikan integritas pelaporan keuangan dengan cara terus memantau dan memberikan kontrol. Kebijakan mengenai Komite Audit ditetapkan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015. Keanggotaan Komite Audit di Indonesia telah diatur bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang. Berikut ini pengukuran komite audit yang digunakan dalam penelitian ini:

KA = $JUMLAH\ KOMITE\ AUDIT$ ..... (4)

C. Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Irham Fahmi (2016:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle), dan lainnya. Menurut Jumingan (2016:239), kinerja keuangan yaitu gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah hasil suatu perusahaan yang telah dicapai dalam satu periode tertentu dalam

UNMAS DENPASAR

pengelolaan keuangan perusahaan dengan baik dan benar. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka semakin baik pula citra yang didapatkan oleh perusahaan tersebut.

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

a. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
b. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
c. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
d. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, hal tersebut diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.

UNMAS DENPASAR

Menurut Kasmir (2016:106), bahwa untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Adapun rasio-rasio yang dimaksud dalam Kasmir (2016:110-115), yaitu: rasio likuiditas, rasio leverage atau rasio

solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan dan rasio penilaian. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Equity* (ROE) dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Laksono dan Kusumaningtias (2021) *Return on equity* merupakan alat analisis keuangan untuk mengukur profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. ROE dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{LABA\ SETELAH\ PAJAK}{EQUITAS}\ x\ 100\% \quad \text{.....(5)}$$

2.2. Hubungan Antar Variabel

A. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajer yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, yaitu dewa direksi dan dewan komisaris. Dengan adanya kepemilikan manajerial kepentingan antara pemegang sama dan pihak manajer dapat disejajarkan. Karena manajer akan merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Menurut Tertius dan Christiawan (2016) jika manajemen memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan maka manajemen akan memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan pemilik. Dengan

UNMAS DENPASAR

demikian, konflik kepentingan antara pemilik dan agen dapat terhindarkan. Dengan berkurangnya konflik kepentingan maka terjalin kesinambungan dalam perusahaan yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan shareholder dan stakeholder. Kepemilikan manajerial diukur menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan dewan komisaris terhadap jumlah saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Jadi semakin banyak jumlah kepemilikan manajerial di dalam seuatu perusahaan maka manajer akan cenderung untuk tidak akan mengambil keputusan yang dapat merugikan perusahaan dan manajer akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan, karena manajer memiliki bagian atas keuntungan yang diperoleh. Dengan begitu, kepentingan antara manajer dengan pemegang saham akan sejalan dan akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Novitasari, dkk (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah kepemilikan manajerial didalam suatu perusahaan, maka manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan agar tidak terjadi kerugikan terhadap perusahaannya, karena manajer juga merupakan salah satu pemilik saham dari perusahaannya. Dengan begitu kepentingan antara manajer dan

UNMAS DENPASAR

pemegang saham memiliki kepentingan yang sama, sehingga kinerja keuangan perusahaan akan meningkat.

B. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan

Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh institusi, atau lembaga lainnya. Peran kepemilikan institusional didalam perusahaan sangat penting, karena dapat meminimalisir terjadinya masalah keagaenan antara pemegang saham dan pihak manajer. Menurut (Wijayanti dan Mutmainah (2012) bahwa kepemilikan oleh institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Dengan demikian tingkat pengendalian terhadap tindakan dan kinerja manajemen sangat tinggi, sehingga potensi kecurangan yang dapat merugikan perusahaan dapat diminimalisir. Kepemilikan institusional diukur menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Jadi semakin banyak jumlah kepemilikan institusional disuatu perusahaan maka pengawasan terhadap manajer akan semakin lebih besar, sehingga manajer dapat lebih dikontrol agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

UNMAS DENPASAR

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Suryanto dan Refianto (2019) serta Novitasari, dkk (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah kepemilikan institusional maka semakin kuat monitoring dan kontrol terhadap manajer perusahaan, agar pemegang saham dapat mengendalikan perilaku manajer agar sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat.

C. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent. Menurut FCGI Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut), memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan

UNMAS DENPASAR

perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Keberadaan dewan komisaris independen juga sebagai penengah. Menghindari dan mengurangi masalah keagenan antara pemegang saham dan dewan direksi. Sehingga dewan komisaris independen menjadi penyeimbang perusahaan dan menjembatani kepentingan pemegang saham dan dewan direksi agar tetep sama dengan tujuan perusahaan. Dewan komisaris independen diukur menggunakan jumlah dewan komisaris independen yang ada di dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan terhadap dewan direksi akan lebih maksimal dan untuk opsi yang didapat oleh dewan direksi untuk mengambil keputusan semakin banyak. Serta menyebabkan dewan direksi tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik dan terkontrol.

UNMAS DENPASAR

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Nababan, dkk (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan maka pengawasan terhadap kinerja dewan direksi akan menjadi lebih baik sehingga kinerja keuangan perusahaan akan meningkat.

D. Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara professional dan independent. Komite audit memiliki tugas untuk membantu fungsi pengawasan dewan komisaris terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan dan system pengendalian di dalam perusahaan. Komite audit memiliki peran untuk menjembatani antara auditor internal dan auditor eksternal sehingga pelaporan keuangan peusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Wijayanti dan Mutmainah (2012) bahwa dalam kerangka dasar *corporate governance*, implementasi prinsip-prinsip *corporate governance* tergantung atas tiga pilar penting, yaitu internal control yang kuat, audit internal yang independen dan audit eksternal yang memberikan feedback terhadap efektifitas dari proses internal control yang ada di dalam perusahaan. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat menjadi penghubungan antara pemegang saham dengan dewan komisaris dan dewan direksi guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan terjadinya masalah keagenan. Serta dengan adanya keberadaan komite audit dapat mengawasi pihak manajer perusahaan sehingga dapat menghambat tindakkan kecurangan dan manipulasi. Komite audit diukur menggunakan jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan, sehingga pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap

UNMAS DENPASAR

kinerja keuangan perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Abduh dan Rusliati (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin banyak komite audit di dalam suatu perusahaan maka pengawasan terhadap pelaporan keuangan perusahaan akan semakin baik dan kontrol terhadap proses akuntansi dan keuangan akan semakin membaik juga, sehingga kinerja keuangan perusahaan akan meningkat pula.

2.3. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Abduh dan Rusliati (2018) tentang ”Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan” bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accruals* dan kondisi kinerja keuangan yang diukur dengan *return on assets* pada perusahaan pertambangan periode 2012-2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Aprila, dkk (2022) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance*

UNMAS DENPASAR

terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA (*Return on Assets*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah 141 perusahaan manufaktur yang ditentukan berdasarkan *purposive sampling*. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa dewan komisaris, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Muntahanah dan Murdijaningsih (2020) tentang "Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pertambangan di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA (*Return on Assets*). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Sampel yang didapat yaitu sebanyak 70 perusahaan. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang dilihat dari kepemilikan manajerial dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pertambangan. Sedangkan tata kelola perusahaan yang dilihat dari komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pertambangan.

Penelitian Nababan, dkk (2021) tentang "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Yang menjadi

UNMAS DENPASAR

populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019 sebanyak 47 perusahaan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling sehingga sampel yang digunakan adalah 8 perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROE. Sedangkan komisaris independen berpengaruh terhadap ROE.

Novitasari, dkk (2020) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI". Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, direksi, komisaris, dan komite audit terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA (*Return on Assets*). Seluruh populasi penelitian Perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel penelitian 14 perusahaan, jumlah observasi 42. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan variabel dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Suryanto dan Refianto (2019) tentang "Analisis Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan". penelitian ini menguji secara empiris pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA (*Return on Assets*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan

UNMAS DENPASAR

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 - 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen menghasilkan pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Wiariningsih, dkk (2019) dengan penelitiannya yang berjudul "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016". Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 dengan jumlah 41 perusahaan. Pemilihan sampel perusahaan menggunakan metode purpose sampling dimana dari 41 populasi perusahaan menjadi 37 perusahaan yang terpilih. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

UNMAS DENPASAR

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan variabel independen *Good Corporate Governance* dengan menggunakan indikator kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite aduit serta menggunakan variabel dependen Kinerja Keuangan Perusahaan dengan pengukuran *Return on Equity* (ROE). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode tahun yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2017 dan tahun 2021.